

**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS**

TESIS



OLEH :

NAMA : DONAL ADRIAN SIHOMBING
NPM : 231200006
PROGRAM STUDI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2025

**ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Hukum Pada
Program PascaMagister Universitas Labuhanbatu**

OLEH :

**NAMA : DONAL ADRIAN SIHOMBING
NPM : 231200006
PROGRAM STUDI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2025

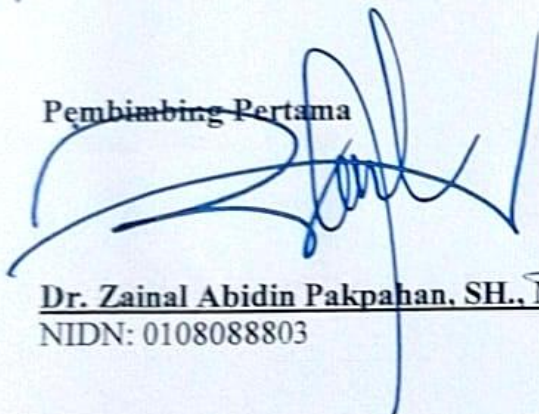
HALAMAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS : ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN
HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NAMA MAHASISWA : DONAL ADRIAN SIHOMBING
NOMOR INDUK : 2312100006
PROGRAM STUDI : HUKUM

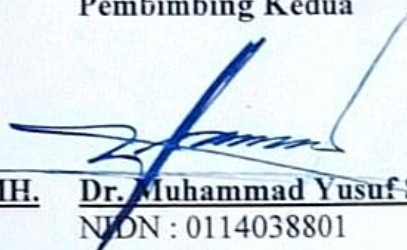
Menyetujui Tim Pembimbing:

Pembimbing Pertama



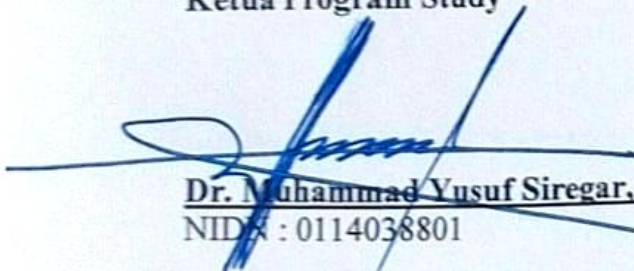
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH.
NIDN: 0108088803

Pembimbing Kedua



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NIDN : 0114038801

Ketua Program Study



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NIDN : 0114038801

Direktur Pasca Sarjana



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH.
NIDN: 0108088803

Tanggal lulus :





LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DONAL ADRIAN SIHOMBING
Nim : 2312100006
Program Studi : Hukum
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

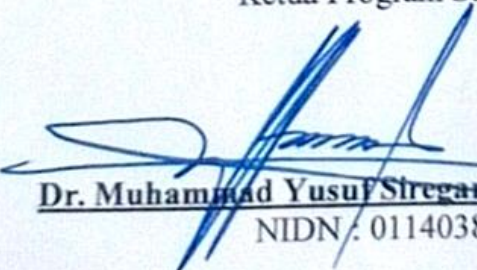
Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Megister Hukum (M. H)

Pada Tanggal 23 September 2025

Penguji :

1. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. Ketua Penguji 
2. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H. Anggota Penguji 
3. Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn., Anggota Penguji 
4. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H Anggota 

Ketua Program Study


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H.
NIDN: 0114038801



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN: 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : DONAL ADRIAN SIHOMBING
NPM : 2312100006
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL TESIS : ANALISIS HUKUM DISPARITAS
PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Magister Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan Tesis ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, September 2025
Yang Membuat Pernyataan



DONAL ADRIAN SIHOMBING

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu serta Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat. **Kedua**, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, disparitas putusan narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim terhadap pasal-pasal narkotika, faktor subjektivitas hakim dalam menilai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, perbedaan dalam penanganan kasus seperti jumlah dan jenis barang bukti, kesulitan dalam menerapkan rehabilitasi dan perannya dalam putusan, serta perbedaan tuntutan dari jaksa. Penentuan berat ringannya hukuman masih bersifat subjektif, dipengaruhi oleh kebebasan hakim, latar belakang terdakwa, serta sikap dan penyesalan terdakwa selama persidangan. **Ketiga**, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Lebih berfokus kepada besar atau kecil barang buktinya serta lebih mengarah kepada tujuan dari Penguasaan dari Narkotika tersebut apakah untuk diperdagangkan atau untuk dipakai selain itu pertimbangan hakim merujuk kepada Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan mengancam generasi muda Indonesia serta Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Kata kunci : *Analisis Hukum, Disparita, Putusan Hakim, Penjatuhan Sanksi, Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Pengadilan Negeri Bengkulu;*

ABSTRAC

This study aims to determine how criminal sanctions are imposed on perpetrators of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, how sanctions are applied to perpetrators of narcotics abuse based on several decisions of the Bengkalis District Court and how judges consider them in deciding narcotics abuse cases. This study is normative. The results of the study indicate that first, criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse have been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The maximum and minimum limits provide judges with the freedom to impose sentences on perpetrators of narcotics abuse. The disparity in sentencing basically begins with the sanctions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, which opens up opportunities because there are minimum and maximum limits for sentencing, so that judges are free to move to get the sentence they think is appropriate. Second, The application of criminal sanctions against perpetrators of Narcotics Abuse based on several decisions at the Bengkalis District Court is based on factors revealed in the trial, disparities in narcotics decisions at the Bengkalis District Court include different legal interpretations by judges on narcotics articles, the judge's subjective factor in assessing the defendant's aggravating and mitigating circumstances, differences in case handling such as the number and type of evidence, difficulties in implementing rehabilitation and its role in the decision, and differences in demands from the prosecutor. The determination of the severity of the sentence is still subjective, influenced by the judge's freedom, the defendant's background, and the defendant's attitude and remorse during the trial. Third, the Judge's Consideration in deciding Narcotics Abuse Cases Focuses more on the size of the evidence and is more directed at the purpose of the Control of the Narcotics whether for trade or for use in addition to the judge's consideration referring to the Defendant's actions not supporting the government's program in eradicating Narcotics and threatening the young generation of Indonesia and the Defendant's actions causing unrest in society;

Keywords: Legal Analysis, Disparity, Judge's Decision, Imposition of Sanctions, Criminal Procedure, Narcotics Abuse, Bengkalis District Court;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tesis ini guna untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun Judul Proposal Tesis yang penulis kemukakan adalah : ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun Tesis ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari Tesis ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yaitu :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH. selaku Direktur Pasca Magister Universitas Labuhanbatu dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.

3. Bapak Dosen Pembimbing II Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.
4. Kepada kedua orang tua dan istriku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya Tesis ini.
5. Kepada istri dan anak-anak ku yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Tesis ini.
6. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu.
7. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantau Prapat, September 2025

Penulis



DONAL ADRIAN SIHOMBING

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsepsi.....	17
G. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Bahan-bahan Hukum yang Digunakan.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
 BAB II	
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	25
a. Pengertian Sanksi Pidana.....	25
b. Ruang Lingkup Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika	33
c. Ketentuan Sanksi Pidana Narkotika Dan Psikotropika	40
d. Ketentuan Pidana Narkotika Dan Psikotropika	50

e.	Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	55
BAB III	PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	45
3.1	Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindakan Penyalahgunaan Narkotika	45
3.2	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Beberapa Putusan Di Indonesia;.....	50
3.2.1	Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	52
3.2.2	Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Keterangan Saksi.	54
3.2.3	Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Keterangan Terdakwa.	56
3.2.4	Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Barang-Barang Bukti.	58
3.2.5	Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Narkotika.....	58
3.2.6	Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	62
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	65
4.1	Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditinjau berdasarkan Teori Keadilan	65

4.2 Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditinjau berdasarkan Teori Pemidanaan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	79